

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat bagaimana pemerintah menciptakan tata kelola yang baik dalam pemerintahannya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan otonomi daerah dimana hal ini dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan dapat lebih efisien dan efektif serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Dengan adanya otonomi daerah saat ini erat kaitannya dengan sistem pemerintah daerah yang berlangsung di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Adanya Pelaksanaan otonomi daerah memiliki alasan penting salah satunya untuk memperbaiki kinerja di pemerintahan Kabupaten atau Kota (Ramdhani, Hisamuddin, and Moch. Shulthoni 2020). Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di bawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan, dimana setiap kecamatan terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai suatu wilayah yang otonom, desa diberikan beberapa hak istimewa yaitu diantaranya pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta pembangunan desa (Undang-Undang No 32 Tahun 2004).

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu uang ataupun barang yang masih berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Setiap desa mempunyai kemampuan yang berbeda dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluarannya. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri adalah suatu rancangan keuangan Pemerintah Desa yang berbentuk dokumen

penting dimana dokumen ini memuat seluruh penganggaran yang terjadi di Desa selama jangka waktu satu tahun anggaran. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya, sehingga desa semakin transparan terhadap proses pengelolaan keuangan desa (Permendagri No.20 Tahun 2018). Pengelolaan keuangan desa harus menerapkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam menerapkan asas tersebut diperlukan adanya sebuah analisis untuk menilai kinerja keuangan desa.

Kinerja keuangan desa merupakan suatu tingkat pencapaian hasil kinerja keuangan pemerintah desa, yang meliputi Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan menggunakan indikator keuangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja begitu penting untuk membantu pengelolaan dan memperbaiki kinerja pemerintah, untuk mengevaluasi laporan keuangan guna mengetahui baik buruk laporan keuangan, untuk mengetahui efektifnya suatu laporan keuangan, maka dapat diketahui bagaimana perkembangan laporan keuangan di masa yang akan datang. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan desa perlu adanya rasio keuangan karena kegunaannya sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja keuangan suatu pemerintah desa. Analisis rasio yang digunakan antara lain analisis rasio kemandirian, analisis rasio efisiensi, analisis rasio efektivitas, analisis rasio pertumbuhan, dan analisis rasio keserasian.

Analisis rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa (Mahmudi, 2019). Analisis rasio keserasian adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal (Halim and Kusufi, 2012). Analisis rasio efektivitas merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa (Mahmudi, 2019). Analisis rasio efisiensi merupakan analisis yang memberikan

suatu gambaran tentang tingkat penghematan anggaran belanja yang digunakan oleh pemerintah desa (Mardiasmo, 2002). Analisis rasio pertumbuhan merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kinerja anggarannya apakah sedang mengalami pertumbuhan atas pendapatannya secara positif atau negatif dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2011).

Penelitian yang dilakukan khususnya yang masih berkaitan dengan analisis pengukuran kinerja keuangan desa sebelumnya telah banyak dilakukan dengan objek yang berbeda. Penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu” bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu belum efektif hal ini masih terdapat banyak program yang kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak jalanan-jalanan yang rusak (Amin 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi, Safitri, Rukmanawati, Anwar, & Kabib (2020) dengan judul “Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016–2018” bahwa efektivitas kinerja keuangan tahun 2016-2018 cenderung lebih sangat efektif karena realisasi Pendapatan Asli Desa sesuai dengan target. Tingkat efisiensi kinerja keuangan tahun 2016-2018 cenderung kurang efisien. Berdasarkan perkembangan kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 3 (tiga) tahun.

Dalam penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu tahun penelitian, objek penelitian dan analisis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah desa. Desa Gentengkulon merupakan salah satu desa yang setiap tahunnya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dikutip dari website Desa Gentengwetan <http://gentengwetan.desa.id>, dikatakan bahwa Desa Gentengkulon lebih maju dalam pembangunan infrastruktur daripada desa-desa yang lain di Kecamatan Genteng dengan anggaran dana yang hampir sama. Maka dari itu peneliti memilih Desa

Gentengkulon sebagai objek penelitian. Desa Gentengkulon pada 2019 telah merealisasikan total pendapatan desa sebesar Rp 2.501.391.445 dan total belanja desa sebesar Rp 2.184.253.353. Dan pada 2020 Pemerintah Desa Gentengkulon merealisasikan total pendapatan desa sebesar Rp 2.634.424.773 dan total belanja desa sebesar Rp 2.645.365.035. Dilihat dari besarnya dana yang sudah terealisasi maka perlu adanya evaluasi atau analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon. Apakah Pemerintah Desa Gentengkulon mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik agar dapat mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon. Hal tersebut pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kabupaten Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten berdasarkan rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio kemandirian?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio efektivitas.

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio kemandirian.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio keserasian.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi berdasarkan rasio pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa dengan menggunakan perhitungan dari analisis rasio keuangan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu memberikan penjelasan sejauh mana tingkat kinerja keuangan Pemerintah Desa Gentengkulon, sehingga pemerintah desa dapat terpacu dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu memberikan transparansi dari informasi mengenai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Gentengkulon kepada masyarakat.

3) Bagi Akademis

Penelitian ini bisa menjadi suatu acuan atau gambaran pada penelitian selanjutnya yang masih berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.